

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Patronase

Patronase didasarkan pada istilah patron klien yang merupakan hubungan personal antara individu atau kelompok yang lebih kuat (patron) dan yang bergantung padanya (klien), di mana patron memberikan perlindungan atau sumber daya dan klien memberikan balesan berupa jasa pribadi kepada patron, jasa tersebut bisa berupa peraturan-peraturan yang disahkan berdasarkan pada kepentingan si patronnya, atau juga bisa dengan menyediakan jumlah kursi yang diperlukan oleh si patron. Menurut (Scott, 1972) menjelaskan bahwasannya di dalam hubungan patron klien terdapat istilah-istilah lainnya yang dimana istilah tersebut terdiri dari klientelisme, kontrak diadik, jaringan pribadi. Jaringan relasi patron klien ini dibangun, dipelihara, dan berinteraksi sedemikian rupa sehingga memungkinkan terjadinya generalisasi.

Menurut (Scott, 1972) hubungan antara patron klien ini sangat fleksibel. Hubungan yang terjadi tidak semua tentang si patron yang selalu memberikan perlindungan kepada klien tapi bisa jadi hubungan tersebut berbalik. Jadi hubungan timbal balik yang terjadi antara patron klien ini menyesuaikan tergantung kondisi dari masing-masing kedua belah pihak, yang dimana sifat dari pertukarannya bisa sangat bervariasi dari waktu ke waktu. Alasan hubungan

patron klien berlangsung dalam jangka waktu lama yakni patron tertentu akan mempertahankan kliennya selama ia terus mendominasi penyediaan layanan yang mereka perlukan. Seorang patron juga kemungkinan besar akan mempertahankan pengikutnya jika lingkup timbal balik yang mengikat mereka semakin besar dan hubungan yang terjadi pun akan cenderung bertahan dalam jangka waktu yang Panjang. Meskipun juga harus diakui, ada beberapa hubungan yang tidak selalu memiliki tujuan konkrit. Akan tetapi, seseorang yang melibatkan dirinya dalam beberapa ikatan yang bersifat personal pastilah bertujuan untuk merealisasikan hasil-hasil jangka pendek dan keuntungan-keuntungan yang pasti.

Menurut (Aspinall & Sukmajati, 2015) dijelaskan bahwasannya ketika hubungan patronase ingin berjalan lebih efektif maka yang harus dilakukan yakni membangun hubungan klientalistik murni, dalam hal ini sehingga relasi tidak semata-mata hanya berupa pertukaran material dalam jangka waktu pendek, akan tetapi relasi akan terjalin dalam jangka waktu Panjang yang sama-sama saling menguntungkan kedua belah pihak. Menurut (Azad, 2023) klientelisme merupakan relasi kekuasaan yang bersifat individualistik yang dimana saling menukar keuntungan politik baik itu berupa suara ataupun afirmasi kepada politisi yang memberikan dukungan. Relasi klientalistik ini ditandai dengan adanya hubungan patron klien yang dimana ditandai dengan adanya hubungan klientelisme yang terjadi antara partai politik dengan pondok pesantren (Batubara & Asrinaldi, 2018) .

Relasi klientelisme akan menciptakan pola hubungan yang disebut dengan patron-klien, hal ini diperkuat dengan pendapat Mackie dalam penelitian (Batubara & Asrinaldi, 2018) patron-klien adalah istilah yang langsung menunjuk pada hubungan mutualistik antara patron yang berkecukupan dan klien yang membutuhkan. Klientelisme ketika dikaitkan kepada ranah pemilu akan mempengaruhi tingkat partisipasi pemilih khususnya partisipasi santri serta alumninya karena dapat memberikan peluang bagi patron untuk memobilisasi massa. Hal ini dilakukan dengan cara mendukung arahan patron untuk berpartisipasi dalam pemilu ataupun mendukung langkah politik sang patron. Pola hubungan patron-klien ini sering dipraktikkan oleh penguasa birokrasi ataupun tokoh masyarakat salah satunya adalah Kyai.

Peran pondok pesantren Miftahul Huda dan jejaring alumninya yakni Hamida dalam mensosialisasikan paslon-paslon yang berasal dari pihak keluarga pesantren di setiap acara keagamaan serta dengan dipilihnya partai PPP sebagai naungan untuk keluarganya dalam berpolitik dan adanya *One Colour* di setiap spanduk yang dipasangnya yakni Hamida *One Colour*. Hal ini yang sangat menegaskan bahwa Miftahul Huda satu naungan di dalam PPP. Berarti hal tersebut secara tidak langsung sudah menciptakan relasi klientelisme di antara mereka di antara partai PPP dengan pesantren Miftahul Huda, karena sudah mengandung sifat timbal-balik antara patron dan klien yang dimana pemberian barang atau jasa dari satu pihak merupakan respon terhadap pemberian keuntungan dari pihak lain (Hicken, 2011) dalam (Batubara & Asrinaldi, 2018).

Menurut (Scott, 1972) dalam penelitian (Azad, 2023) menjelaskan mengenai ciri-ciri hubungan patron-klien yang meliputi:

- a. Sesuatu yang diberikan oleh satu pihak dianggap memiliki nilai oleh pihak lain.
- b. Terdapat ketidaksetaraan atau ketidakseimbangan dalam kepemilikan sumber daya ekonomi.
- c. Terdapat hubungan yang saling menguntungkan karena prosesnya berupa pemberian secara timbal balik meskipun keuntungan yang didapat tidak seimbang.
- d. Hubungan timbal balik yang terjadi tidak terjadi karena paksaan apalagi formalitas.
- e. Pihak klien memungkinkan untuk melakukan penawaran.
- f. Adanya ketidakseimbangan dalam pertukaran, nilai yang diberikan oleh Patron dianggap jauh lebih penting dibandingkan dengan nilai yang diberikan oleh Klien.
- g. Terdapat hubungan yang mempertahankan loyalitas, seperti kesetiaan dan kepatuhan.
- h. Terdapat hubungan antar individu yang bersifat langsung dan *intensif* antara patron dan klien, dengan interaksi tatap muka (*face to face*).
- i. Relasi ini bersifat luwes dan meluas.

2.1.2 Pemilu Legislatif

Pemilihan umum atau pemilu sebagai intrsumen dalam mewujudkan demokrasi di Indonesia yang dimana menurut (Risan Pakaya, Yusril Katili, 2022) pemilu merupakan alat dalam menjaga kedaulatan rakyat sebagai bentuk berkembangnya negara demokrasi. Sedangkan menurut Rahman dalam (Anshori, 2019) pemilu merupakan sarana yang disediakan oleh pemerintah untuk rakyat dalam menentukan wakil-wakilnya untuk menjalankan kedaulatan rakyat.

Berdasarkan Undang-Undang No.7 Tahun 2017 dalam (Anshori, 2019) tentang pemilihan umum Pasal 1 Poin 1 dijelaskan bahwa dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia, berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pemilihan umum adalah proses kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, serta anggota Dewan Perakilan Rakyat Daerah. Pemilihan ini dilakukan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Pengertian tersebut sekaligus mengacu pada apa yang dimaksud dengan pemilu legislatif namun untuk pemilihan presiden dan wakilnya tidak termasuk ke dalam pemilu legislatif. Perpolitikan di negeri ini selalu berubah seiring dimulainya periode pemilu, dinamika politik yang terjadi menyebabkan berbagai kemungkinan-kemungkinan bisa terjadi, segala hal dilakukan demi mempertahankan kekuasaannya. Begitupun yang terjadi di

pemilu legislatif kabupaten Tasikmalaya tahun 2024 melihat adanya relasi yang semakin kuat antara pondok pesantren Miftahul Huda dengan partai PPP.

2.1.3 Pondok Pesantren dan Partai Politik

2.1.3.1 Pondok Pesantren

Menurut (dhofier, 1982) Pesantren pada dasarnya adalah sebuah asrama Pendidikan islam tradisional di mana para siswanya tinggal bersama dan belajar di bawah bimbingan seorang guru yang dikenal dengan sebutan “kiyai”. Sedangkan menurut (MT, 2017) Pesantren merupakan tempat atau salah satu institusi Pendidikan tradisional di Indonesia yang cukup unik. Ada karakter kuat melekat pada pesantren dalam menjalankan aktivitas pendidikannya yang independent tanpa adanya intervensi dari luar. Gus Dur berpendapat bahwa pesantren merupakan bagian dari subkultur budaya Indonesia yang memiliki hak otonomi dalam menentukan kebijakan, baik dalam hal kurikulum maupun dalam memenuhi kebutuhan ekonomi sehari-hari melalui badan usaha yang mereka dirikan. Menurut Ibnu Hajar dalam (Wisnu, 2018) bahwa model Pendidikan dari pesantren sebelumnya merupakan model Pendidikan agama Hindu yang mengalami modifikasi dan perkembangan.

Pesantren didasari oleh tiga elemen utama: kiai, santri, dan pondok. Ketiga unsur ini menjadi dasar utama dari eksistensi pesantren yang saling terkait dan berinteraksi secara berkelanjutan (MT, 2017). Tujuan dari Pendidikan pesantren bukan hanya memperkaya pikiran murid dengan

penjelasan-penjelasan, tetapi untuk meninggikan moral, melatih dan mempertinggi semangat, menghargai nilai-nilai spriritual dan kemanusiaan, mengajarkan sikap dan tingkah laku yang jujur dan ber moral, dan menyiapkan para murid untuk hidup sederhana dan bersih hati (dhofier, 1982).

Secara garis besar pondok pesantren di Indonesia terdapat dua jenis yakni :

1. Pondok pesantren modern yang dimana tidak hanya ajaran agama saja yang diajarkan tetapi pendidikan formal juga ikut diajarkan seperti halnya pendidikan bahasa Inggris bahkan ada pondok pesantren yang mewajibkan para santrinya untuk berbahasa Inggris pada waktu tertentu.

2. Pondok Pesantren Salafiyah

Pondok pesantren ini umumnya merupakan pondok pesantren tradisional yang fokus pembahasannya terhadap kitab kuning. Nah berbeda halnya dengan pondok pesantren modern yang dimana hubungan antara guru dengan muridnya tidak bersifat kaku sedangkan di pondok pesantren salafi sendiri biasanya santrinya berlomba-lomba untuk mengabdikan diri kepada gurunya demi tercapai kebarokahan.

Menurut (Fikri, 2022) dalam (Azad, 2023) Kehadiran pondok pesantren di Indonesia, terutama yang telah ada sejak lama, sering kali

berdampingan dengan masyarakat sekitarnya. Ini memungkinkan anggota pesantren dan warga sekitar untuk hidup berdampingan. Oleh karena itu penting bagi pondok pesantren untuk menjaga hubungan baik dengan masyarakat, sehingga semua kegiatan yang dilakukan mendapat dukungan dan penghargaan dari warga sekitar. Seperti halnya yang dilakukan oleh pondok pesantren Miftahul Huda Manonjaya mampu berbaur dengan masyarakat sekitar dalam jangkauan yang sangat luas. Contohnya setiap menjelang bulan Ramadhan atau sering disebut dengan munggahan atau setiap lebaran haji para santrinya selalu di sebar untuk melakukan suatu kegiatan yang berbaur dengan masyarakat di beberapa kampung. Sehingga pondok pesantren ini sudah sangat tetrakenal di kalangan masyarakat serta program-program yang dimilikinya pun tak luput dari dukungan masyarakat bahkan hubungannya dengan politik pun mendapat dukungan yang positif dari masyarakat dibuktikan selalu antusiasnya masyarakat dalam mendukung calon yang berasal dari kalangan pesantren.

2.1.3.2 Partai Politik

Negara Indonesia merupakan negara yang menganut sistem demokrasi, yang dimana dalam sistem ini partai politik menjadi salah satu pilarnya karena dalam negara demokrasi adanya sebutan bahwa pemerintahan ada di tangan rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat dan partai politik lah yang bisa menjadi sarana dalam mengaplikasikan hal tersebut. Lahirnya partai politik di Indonesia melalui sejarah yang sangat panjang

diiringi dengan berbagai intrik dan pergulatan paham di dalamnya. Pembentukan partai politik terjadi Pasca kemerdekaan republik Indonesia yang ditandai dengan runtuhnya pemerintahan colonial Belanda, dari sana dibukalah kebebasan seluas-luasnya kepada masyarakat untuk membentuk sebuah organisasi apapun termasuk partai politik. Pada saat itu sudah adanya tiga partai di Indonesia yaitu partai Masyumi yang berlandaskan dengan paham Islam, PNI yang berlandaskan paham Pancasila dan PKI yang berlandaskan paham komunis. Terjadinya persaingan yang sangat sengit antara tiga partai tersebut karena ketiganya berusaha untuk mengubah ideologi negara Indonesia sesuai dengan paham yang dianut oleh partainya. Ideologi yang dimiliki oleh partai politik disesuaikan dengan kepentingan-kepentingan yang ingin dicapai oleh partai tersebut. Hal ini sejalan dengan apa yang disebutkan oleh (Budiarjo, 2008) :“ partai politik adalah suatu kelompok yang terorganisir yang anggota-anggotanya memiliki orientasi, nilai-nilai dan cita-cita yang sama. Tujuan kelompok ini ialah untuk memperoleh kekuasaan politik dan merebut kedudukan politik, biasanya dengan cara konstitusional, untuk melaksanakan programnya”

Partai politik merupakan sekumpulan manusia yang memiliki paham dan tujuan yang sama sehingga disatukan dalam sebuah organisasi untuk mencapai tujuan tersebut. Dimana tujuan tersebut yakni memperoleh kekuasaan di dalam politik karena ketika kekuasaan tersebut

sudah didapatkan maka akan sangat mudah bagi kelompok tersebut dalam merealisasikan keinginan-keinginan yang ingin dicapainya agar sejalan dengan paham yang dianutnya. Diibaratkan dengan pisau dapur, ketika orang tersebut sudah memiliki pisau maka pemilik pisau tersebut bebas dapat digunakan untuk apa aja terserah yang memegangnya mau itu dipakai buat kebaikan ataupun dipakai untuk melakukan kejahatan . Begitupun dengan yang memiliki kekuasaan maka memiliki kendali juga dalam mengatur sebuah kebijakan mau itu ke arah yang baik maupun ke arah yang jahat tergantung orang yang memegangnya mau memilih pilihan yang mana.

Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 partai politik adalah:

“Partai Politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”. Dari dua pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa intinya partai politik ini bermuara pada sekelompok orang yang memiliki tujuan yang sama dan untuk mencapai tujuan tersebut dengan cara mendapatkan

kekuasaan yang dimana kekuasaan tersebut didapat dari cara yang legal yakni pemilihan umum.

Adapun fungsi dari partai politik sendiri menurut (Budiarjo, 2008) di dalam negara demokrasi terdapat beberapa point, diantaranya adalah:

1. Sarana komunikasi politik
2. Sarana sosialisasi politik
3. Sarana rekrutmen politik
4. Sarana pengatur konflik

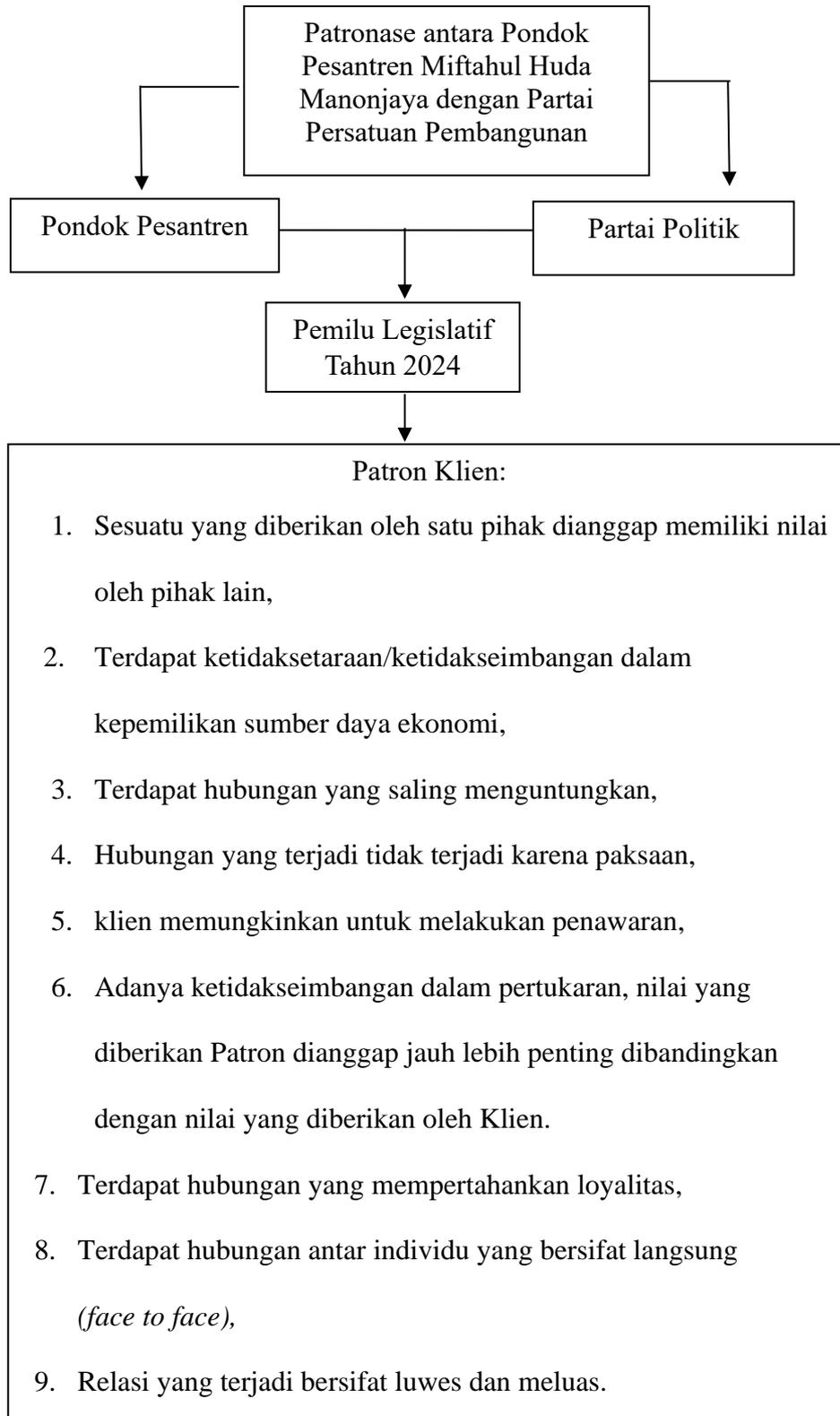
Sarana komunikasi politik, dimana dalam fungsi ini partai politik harus mampu menjadi perantara dalam menyampaikan informasi atau berbagai aspirasi dari masyarakat ke lembaga pemerintahan begitupun sebaliknya informasi yang dari pemerintah disampaikan kepada masyarakat. Sarana sosialisasi politik, dari kata sosialisasi sendiri sudah sangat jelas bahwa partai politik harus mampu melakukan suatu sosialisasi yang merupakan proses pengenalan sesuatu hal dengan baik sehingga menjadi lebih dikenal dan lebih dipahami oleh masyarakat. Semisal masyarakat yang belum memahami tujuan dari didirikannya partai A atau B akan menjadi lebih paham ketika sudah dikasih pemahaman melalui proses sosialisasi ataupun penanaman terkait berpolitik yang benar dan sehat itu seperti apa. Sarana rekrutmen politik, dimana dalam poin ini sangat penting sekali untuk diperhatikan oleh pimpinan-pimpinan dari setiap partai politik untuk merekrut sumber daya

manusia yang baik dan sesuai dengan paham yang dianut dari masing-masing partainya. Mengapa demikian karena orang-orang tersebut merupakan calon rakyat yang benar-benar pantas dalam mewakili masyarakat pada proses menyampaikan setiap aspirasi kepada pemerintah. Terakhir ada sarana pengatur konflik, dimana partai politik harus mampu dalam mengendalikan konflik yang terjadi di masyarakat dengan cara mengumpulkan setiap aspirasi-aspirasi masyarakat pelaku konflik yang kemudian akan dibahas terlebih dahulu dalam musyawarah di DPR sehingga dapat dihasilkan solusi terbaik diantara kedua belah pihak dan konflik yang sedang terjadi pun dapat diredam.

Relasi yang terjadi antara pesantren dengan partai politik merupakan pengaruh dari kehidupan manusia sebagai makhluk sosial yang dimana tidak lepas berinteraksi dengan orang lain, diantara individu satu dengan lainnya akan saling ketergantungan untuk memenuhi kebutuhannya masing-masing (Rizal, 2019). Adapun relasi bisa terjadi antara individu dengan individu, individu dengan kelompok, ataupun kelompok dengan kelompok. Dalam relasi ini pesantren membutuhkan wadah dalam proses penyampaian beragam aspirasi-aspirasi nya demi kemaslahatan umat islam. Sehingga seringkali relasi yang terjalin dengan kuat ini dipengaruhi oleh kesamaan ideologi yang sama (Muslihudin, 2013). Sedangkan partai politik membutuhkan massa atau suara serta membutuhkan perwakilan rakyat untuk menjadikan suatu partai politik

berkembang lebih besar. Sehingga dalam hal ini sudah menjadi *trend* bahwasannya pesantren menjadi sasaran empuk untuk suatu partai politik mendulang suara yang sangat banyak, sudah banyak sekali pondok pesantren di Indonesia yang memiliki relasi baik itu relasi yang terjadi antara kiyai nya saja dengan partai politik maupun secara keseluruhan antara pondok pesantren dengan partai politik. Selain itu adanya kepentingan, relasi atau hubungan tidak lepas dari beberapa unsur keterkaitan kepentingan, ketika ada yang menjembatani kesamaan kepentingan atau akomodasi kepentingan maka akan dengan mudah terjadinya relasi atau hubungan. Selain itu menurut (Ramdani et al., 2009) biasanya relasi politik yang dilakukan oleh suatu partai politik biasanya disesuaikan dengan kultur masyarakat setempat. kondisi dari kabupaten Tasikmalaya yang notabene daerah yang dikelilingi oleh pondok pesantren sehingga relasi yang terjalin adalah dengan pondok pesantren.

2.2 Kerangka Penelitian



Berdasarkan Sejarah perpolitikan pondok pesantren Miftahul Huda Manonjaya yang berperan sebagai lembaga pendidikan agama sudah memiliki keterkaitan politik dengan partai politik khususnya dengan partai PPP. Awal mula relasi antara pondok pesantren dengan partai politik dilihat oleh publik ketika cucu dari pendiri pondok pesantren yakni UU Ruzhanul Ulum menjadi pengurus partai PPP kemudian disusul dengan pamannya KH Asep Maoshul Affandi yang menjadi anggota DPR RI fraksi partai PPP. Seiring berjalannya waktu relasi yang terjadi semakin erat dibuktikan dengan banyaknya anggota keluarga pesantren yang berkiprah mencalonkan diri menjadi anggota legislatif yang berangkat dari satu partai yang sama yakni PPP. Beriringan dengan relasi yang semakin kuat di tahun 2024 pada pemilu serentak pemilihan anggota legislatif pondok pesantren Miftahul Huda mendeklarasikan “HAMIDA *One Colour*” deklarasi tersebut tidak hanya di sampaikan oleh para alumni dari pondok pesantren Miftahul Huda, akan tetapi disampaikan juga oleh pimpinan utama dari pondok yakni KH Asep Maoshul Affandi. Dalam deklarasi tersebut dijelaskan oleh pimpinannya sendiri bahwasannya di pemilu tahun 2024 pondok pesantren memutuskan untuk satu warna mendukung partai PPP. Fokus utama dari pondok pesantren dengan para alumninya yaitu memenangkan partai PPP bahkan para alumni yang dulunya masih ada yang berkiprah di partai lain diarahkan untuk hanya berkiprah di PPP. Sehingga dari fenomena tersebut menarik untuk di teliti lebih jauh agar dapat diketahui bagaimana patronase yang terjadi antara keduanya.